

## *Advocacy Strategy for Women's Representation in the Japanese Parliament as an Effort to Implement CEDAW Values*

### Strategi Advokasi Representasi Perempuan di Parlemen Jepang sebagai Upaya Pengimplementasian Nilai CEDAW

Indi Dwi Lutfitriani<sup>1</sup>, Takdir Ali Mukti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Undergraduate Program of International Relations Studies, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [indi.dwi.fisip18@mail.umy.ac.id](mailto:indi.dwi.fisip18@mail.umy.ac.id)<sup>1</sup>; [takdiralimukti@umy.ac.id](mailto:takdiralimukti@umy.ac.id)<sup>2</sup>

#### **ABSTRACT**

*As an advanced democracy, Japan has a problem with the low representation of women in parliament. The low representation of women has a long historical background related to the introduction of the Confucian religion from China and the Edo era which imposed male control over the role of women through the Ryusaikenbo principle. Entering the Meiji Restoration Era, women played more roles and the women's movement was born after World War II, but until now it still ranks 3rd lowest in Asia Pacific. This article aims to explore the question of why under-representation of women occurs. The findings show that in general Japanese women have very low interest in politics, apart from the construction of gender which greatly limits their role. It is said that the factor of Confucian values which greatly limited the role of women greatly influenced the thinking and social construction of Japanese society, thereby marginalizing women's political role in society. The implications of these findings will provide opportunities for NGOs such as AFER and WINWIN to optimize their role in Japanese society.*

**Keywords:** parliament, politics, representation, women

#### **ABSTRAK**

Sebagai negara demokrasi yang maju, Jepang memiliki masalah dengan rendahnya representasi perempuan di parlemen. Rendahnya representasi perempuan memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait masuknya agama Konghucu dari Tiongkok dan zaman Edo yang menerapkan kontrol laki-laki atas peran perempuan melalui prinsip Ryusaikenbo. Memasuki Era Restorasi Meiji, perempuan lebih banyak berperan dan gerakan perempuan lahir pasca Perang Dunia II, namun hingga saat ini masih menempati urutan ke-3 terendah di Asia Pasifik. Artikel ini bertujuan untuk menggali pertanyaan mengapa terjadi under-representation terhadap perempuan. Temuan menunjukkan bahwa pada umumnya perempuan Jepang memiliki minat yang sangat rendah dalam politik, selain konstruksi Gender yang sangat membatasi peran mereka. Dikatakan bahwa faktor nilai-nilai Konfusianisme yang

sangat membatasi peran perempuan sangat mempengaruhi pemikiran dan konstruksi sosial masyarakat Jepang, sehingga memarginalkan peran politik perempuan dalam masyarakat. Implikasi dari temuan ini akan memberikan peluang bagi NGO seperti AFER dan WINWIN untuk mengoptimalkan perannya dalam masyarakat Jepang.

**Keywords:** parlemen, politik, representasi, perempuan

#### **INTRODUCTION**

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) berisi komitmen bahwa semua orang berhak atas hak dan kebebasan tanpa memandang warna kulit, Bahasa, ras, agama, atau bahkan jenis kelamin. Maka berdasarkan norma internasional, CEDAW mampu melegitimasi Wanita bahwa mereka memiliki hak, dan kesempatan dalam urusan politik yang setara dengan laki-laki. Akan tetapi pria masih mendominasi politik, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih belum merata di dunia. Berbeda halnya dengan negara-negara Eropa seperti Swedia, Irlandia, Norwegia, atau diluar itu terdapat pula Australia yang memiliki perubahan progresif terhadap keterwakilan politik perempuan. Sangat kontras perbedaannya dengan negara-negara Asia yang dikenal memiliki budaya patriarki yang kental sehingga perempuan harus menghadapi permasalahan yang lebih berat dalam meningkatkan keterwakilan mereka di politik. Jepang menjadi studi kasus menarik pada permasalahan ini sebab Jepang dikenal sebagai negara maju, akan tetapi memiliki ranking gap gender rendah di region Asia bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia (World Economic Forum, 2021).

Karena ketidaksetaraan gender yang terjadi di domestik terkait pekerja perempuan, Jepang juga mengalami tekanan-tekanan yang berasal dari internasional. Karena melihat domestik Jepang sebagai negara yang maju namun belum bisa menangani ketidaksetaraan gender antara hak perempuan dan laki-laki. Sehingga pada akhirnya Jepang menandatangani CEDAW di tahun 1990 (Mizari, 2018).

Mulanya peran perempuan Jepang cukup tinggi pada aspek social politiknya. Bahkan beberapa literatur Tiongkok kuno mencatat bahwa Jepang pernah menjadi “Kerajaan Permaisuri” karena banyaknya pemerintahan permaisuri di Jepang, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. Akan tetapi selama Aristokrasi militer (Shogun-Samurai) di abad 12-19 dan sebelum Perang Dunia II, Perempuan Jepang terpaksa mengurangi keterlibatan mereka di sector publik. Dikarenakan Aristokrasi militer dibawah shogun, maka militer menjadi strategi utama dalam politik, sedangkan perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki, sehingga perempuan tidak dapat memimpin pertempuran dan status perempuan dalam politikpun turut menurun (Azizah, Women Under Representation: Comparative Analysis Between Japan And Indonesia, 2018).

Berdasarkan sejarah politiknya Perempuan Jepang pertama kali diberi hak untuk memilih dalam pemilihan Majelis Rendah pada 10 April 1946, di bawah Pendudukan pimpinan AS, yang merupakan pemilihan umum pertama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sekitar 13,8 juta perempuan memberikan suara dan 39 perempuan terpilih untuk pertama kalinya ke 464 anggota kamar — 8,4 persen dari total pada saat Diet Jepang masih secara resmi memperdebatkan Konstitusi baru. Sebuah Konstitusi baru mulai berlaku kemudian, dengan anggota Diet wanita baru bergabung secara resmi memberikan wanita hak untuk memilih, Kemudian dalam pemilihan Majelis Rendah 2009, 54 perempuan menang —11,3 persen dari total. Empat puluh didukung oleh Partai Demokrat Jepang, yang mengambil alih pemerintahan antara 2009 dan 2012. (Japantimes, 2020).

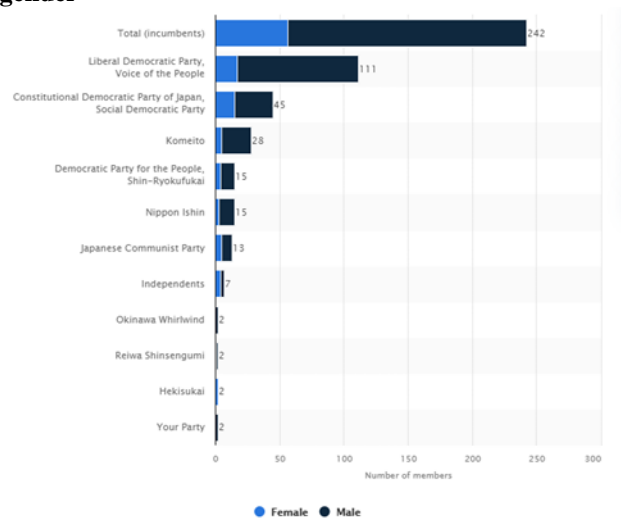
**Tabel 1.1 Kerajaan Permaisuri di Jepang**

Japan		
1	192	Empress Jingu
2	592-628	Empress Suiko
3	592-628 and 655-661	Empress Kogyaku
4	655	Empress Saimei
5	686-697	Empress Jito
6	707-715	Empress Gemmei
7	715-724	Empress Gensho
8	749-758	Empress Koken
9	764	Empress Shotoku
10	1629-1643	Empress Meisho
11	(1762-1771).	Empress Go Sakuramachi

Sumber : Women Under Representation: Comparative Analysis Between Japan And Indonesia, Nur Azizah, 2018  
Terkait keterwakilan perempuan di parlemen, terdapat pula beberapa perdebatan kuota gender di Jepang yang diangkat dalam Diet nasional pada pertengahan 1990-an, 2000, 2009, dan 2012. Pada 1990-an membahas terkait

pembaharuan pemilu oleh PM Hosokawa dari LDP bahwa akan mempertimbangkan pengenalan sistem kuota agar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam politik. Debat kedua di tahun 2000 juga menekankan untuk kuota gender, hingga pada akhirnya tahun 2003 Partai Liberal Demokrat (LDP) berkomitmen untuk mewujudkan ketarwakilan perempuan dalam manajemen dan politik 2020 mendatang sebesar 30%. Munculnya input mengenai kuota gender ini juga diikuti oleh pro dan kontra, dimana terdapat pandangan bahwa kuota gender itu inkonstitusional atau tidak berdasarkan konstitusi yang ada Menurut Katayama (Menteri Dalam Negeri dan komunikasi saat itu). Namun, Katayama juga mempertanyakan kelayakan kuota gender yang mengikat secara hukum sehingga diperlukan langkah-langkah dalam meningkatkan anggota diet Wanita (Azizah, Women Under Representation: Comparative Analysis Between Japan And Indonesia, 2018).

**Grafik 1.1 Number of National Diet members of the House of Councillors in Japan in 2021, by party and gender**



Sumber : Statica, 2021

Pada Mei 2018 undang-undang tentang kesetaraan gender di arena politik disahkan. Undang-undang itu menyerukan kesetaraan gender dalam politik untuk dipromosikan. Namun undang-undang tersebut hanya mewajibkan individu, kelompok dan partai untuk mengambil tindakan sukarela untuk meningkatkan persentase politisi perempuan nasional dan lokal. Pemilihan pertama di bawah undang-undang baru tersebut adalah pemilihan lokal April 2019 yang diadakan secara nasional. Enam dari 59 pemilihan walikota dimenangkan oleh perempuan. Perempuan memenangkan 10,4 persen kursi. Ini hanya sedikit peningkatan dari 9,1 persen kursi majelis prefektur yang diduduki perempuan pada tahun 2015.

Kemudian Kandidat perempuan memenangkan 28 dari 124 kursi untuk pemilihan — 22,5 persen — di pemilihan distrik dan proporsional. Ada 10 pemenang perempuan dari LDP, enam dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, empat independen, tiga dari Partai Komunis Jepang, dua dari Komeito dan masing-masing satu dari Nippon Ishin no Kai, Partai Demokrat untuk Rakyat dan Reiwa Shinsengumi. Lalu apabila dibandingkan dengan jumlah diet di tahun 2021pun Jepang masih belum mengalami peningkatan yang signifikan, dapat dilihat pada grafik 1.1 diatas.

**Tabel 1.2 The Global Gender Gap Index rankings by region, 2021**

**East Asia and the Pacific**

Country	Rank		Score
	Regional	Global	
New Zealand	1	4	0.840
Philippines	2	17	0.784
Lao PDR	3	37	0.750
Australia	4	53	0.731
Singapore	5	58	0.727
Timor-leste	6	64	0.720
Mongolia	7	69	0.716
Thailand	8	80	0.710
Viet Nam	9	87	0.701
Indonesia	10	99	0.688
Korea, Rep.	11	101	0.687
Cambodia	12	103	0.684
China	13	104	0.682
Myanmar	14	109	0.681
Brunei Darussalam	15	111	0.678
Malaysia	16	112	0.676
Fiji	17	113	0.674
Japan	18	119	0.656
Papua New Guinea	19	139	0.635
Vanuatu	20	141	0.625

Sumber : The Global Gender Gap Index rankings, WEF, 2021

Posisi Jepang dalam konteks kesetaraan gender memang masih sangat lemah, bahkan ini dapat terlihat pada Laporan dari World Economic Forum keluaran September 2021 menyatakan bahwa Jepang menduduki Ranking 120 dunia dalam kategori Gender gap, ranking jepang justru lebih buruk jika dibandingkan dengan negara asia pasifik lainnya seperti Indonesia, Timor Leste, Thailand, Myanmar dan lainnya (Word Economic Forum, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya-upaya advokasi baik dari NGO lokal Jepang ataupun pemerintah sendiri yang memiliki legitimasi dalam menciptakan kebijakan untuk dapat mengadvokasi lebih banyak keterwakilan perempuan di parlemen. Melihat

kembali ke grafik 1.1, secara implisit menunjukkan bahwa sedikit kemajuan yang telah dicapai Jepang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Perkumpulan perempuan Jepang menjadi cikal bakal lahirnya advokasi perempuan di berbagai aspek baik budaya, sosial, ataupun politik. Perkumpulan perempuan yang mulanya hanya membahas mengenai sastra dan budaya, lama kelamaan mulai mengarah pada aspek sosial politik keterlibatan perempuan. Perkumpulan yang mulanya berguna untuk membahas karya sastra berubah menjadi ruang pergerakan perempuan dan terus berkembang menjadi organisasi perempuan dan bertransformasi menjadi NGO. NGO menjadi salah satu aktor yang memiliki keterlibatan besar atas meningkatnya pergerakan perempuan di Jepang. NGO ataupun kelompok pergerakan perempuan Jepang memiliki perjalanan Panjang dalam kehadirannya. Beberapa dari NGO perempuan timbul sementara dan bubar di tengah jalan disebabkan oleh berbagai kendala, seperti stigma masyarakat dan budaya yang melekat terhadap perempuan, dana advokasi yang sulit didapatkan, birokrasi dan pengakuan yang sulit diraih, dan sedikitnya anggota yang terlibat hingga berakhir dengan bubarnya suatu NGO ataupun pergerakan perempuan.

Pada skripsi ini berfokus pada advokasi dua aktor yakni Alliance of Feminist Representatives (AFER) dan Women in New World, International Network (WINWIN). AFER dan WINWIN merupakan dua organisasi perempuan yang vocal dan fokus pada “Keterlibatan perempuan di Politik” yang masih bertahan hingga saat ini. Selain dari AFER dan WINWIN terdapat NGO perempuan lainnya namun hanya berfokus pada empowering atau pemberdayaan perempuan saja seperti AJWRC, WAN, NWEC, dan lainnya. Guna membahas advokasi keterwakilan perempuan di Politik, maka diperlukan bahasan aktor non-pemerintah yang berfokus di keterwakilan perempuan di politik, sebab itu skripsi akan berfokus pada advokasi AFER dan WINWIN terhadap pemerintah dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen Jepang.

**LITERATURE REVIEW**

Kajian literatur atau literatur review merupakan uraian mengenai teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk digunakan sebagai landasan kegiatan penelitian. Deskripsi dalam literatur review diarahkan guna mengembangkan serta menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah yang akan diselidiki. Penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian yang dilakukan oleh Makiko Eto pada dua penelitiannya yang berjudul “Women’s movements in Japan: the intersection between everyday life and politics” dimana berisi bahasan gerakan

perempuan di Jepang yang memiliki fungsi sebagai agen politik yang mengubah status quo politik. Gerakan perempuan Jepang dapat dilihat terdiri dari tiga kelompok: yang diprakarsai oleh elit, feminis dan non-feminis partisipatif. Dimana kedua elit tersebut memiliki karakteristik yang sama. Pertama, identitas mereka cenderung berpusat pada motherhood. Bahasa ibu telah menjadi ide kunci di balik mobilisasi perempuan Jepang. Kedua, kampanye mereka menghubungkan tuntutan perempuan dengan politik. Serta penelitian kedua "Women and Representation in Japan" yang membahas tentang faktor-faktor penyebab rendahnya representasi perempuan, dengan menyoroti empat faktor yakni: sistem pemilu; budaya sosial-politik; kuota pemilu; dan kegiatan dan sikap perempuan tentang representasi mereka sendiri. Kedua penelitian diatas menjabarkan faktor dan peranan pergerakan Wanita Jepang, akan tetapi, tidak digunakan kerangka berpikir yang lebih memfokuskan pada usaha atau strategi advokasi perempuan Jepang. Penelitian sebelumnya terfokus pada perspektif penyebab rendahnya representasi perempuan Jepang dari keadaan masa lalu hingga saat ini. Sedikit penelitian yang menyinggung pergerakan perempuan Jepang melalui perspektif strategi advokasi. Sedangkan, untuk mencapai kesetaraan gender dimasa yang akan datang diperlukan bahasan analisis strategi advokasi keterwakilan perempuan baik di bidang sosial ataupun politik.

Pada tulisan ini, penulis menggunakan dua kerangka teoritik yakni teori Rezim internasional dan TAN (Transnational Advocacy Network) sebagai alat guna memetakan dan menjelaskan hasil pembahasan dari tulisan ini. Berdasarkan studi kasus yang saya angkat mengenai advokasi keterwakilan perempuan di parlemen Jepang, Saya menggunakan Teori Rezim Internasional dan Transnational Advocacy Networks (TAN) dari Keck and Sikkink guna menjawab usaha advokasi yang dilakukan oleh AFER dan WINWIN dalam menghadapi isu ini. Penerapan Teori akan dimulai dengan hadirnya nilai dan norma gender yang terangkat menjadi sebuah rezim internasional yakni berupa CEDAW. Terangkatnya CEDAW menjadi sebuah rezim internasional menjadikan nilai dan norma gender menjadi salah satu aspek penting dalam behaviour negara. Pada pengadvokasian keterwakilan perempuan, NGO Jepang menjadikan CEDAW sebagai landasan norma dalam advokasinya. Usaha yang dilakukan oleh NGO lokal ditambah lagi dengan tekanan lingkungan internasional, menjadi bahan input bagi pemerintah Jepang untuk memperbaharui kebijakannya, salah satunya yakni kebijakan kuota perempuan di parlemen sebesar 30%. Usaha advokasi yang dilakukan oleh Movement perempuan dan NGO dengan menggunakan keempat strategi dari TAN yakni Information Politic, Symbolic Politic, Leverage Politic, dan Accountability Politic sebagai usaha advokasi kuota

gender dan representasi perempuan di Parlemen Jepang. Akan tetapi beberapa faktor menjadi rintangan bagi movement dan NGO perempuan di Jepang disebabkan beneaped faktor historis yang mempengaruhi budaya pola pikir dan konstruksi sosial mengenai perempuan di masa kini.

## METHOD

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Arikunto, 2010) penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang mengumpulkan data berdasarkan suatu faktor yang mendukung objek penelitian dan menganalisa faktor tersebut untuk dicari peranan dan kesinambungannya terhadap penelitian. Sedangkan metode kualitatif menurut Lexy J. Moelono dalam (Prastowo, 2012) merupakan sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data yang bersifat sekunder melalui berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dokumen yang bersangkutan dengan penelitian, serta situs internet yang resmi dan terpercaya. Data sekunder sendiri merupakan sebuah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah studi pustaka. Sugitono menjelaskan studi pustaka dalam (Sugiyono, 2012) bahwasannya, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

## RESULT

Advokasi memiliki tujuan utama yakni mendorong perbaikan kebijakan public ataupun behavior negara yang dianggap tidak sesuai, untuk dapat dibenahi sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka yang menuntut perubahan (Azizah, 2014). Pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh NGO dan jaringannya dapat dengan hanya menggunakan satu strategi, atau dapat juga menggunakan keempat strategi yang ada yakni information politic, symbolic politic, leverage politic, dan accountability politic (Keck & Sikkink, 1999).

### A. Strategi Koalisi Advokasi AFER dan WINWIN dalam Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Jepang

Pada bahasan ini akan terbagi menjadi dua fokus bahasan yakni upaya koalisi AFER dan WINWIN dalam mempengaruhi kebijakan Jepang guna mendorong partisipasi perempuan di parlemen Jepang, serta pengawasan kebijakan dan hasil dari advokasi yang telah dilakukan. Pada bahasan pertama mengenai koalisi advokasi antar aktor akan dijelaskan menggunakan konsep TAN meliputi information politic, symbolic politic, dan leverage politic. Serta pengawasan kebijakan dan hasil dari advokasi akan digunakan accountability politic dan data historikal dari AFER dan WINWIN.

### 1. Information Politic

Pada isu advokasi berkenaan dengan keterwakilan perempuan di parlemen AFER menyediakan media berupa facebook serta laman web yang dapat diakses melalui <https://afer-fem.org> yang didalamnya terdapat informasi berkenaan dengan visi misi AFER, mengapa perempuan harus terlibat di politik, laporan survei politik, simposium ataupun webinar gratis berkenaan dengan demokrasi dan perempuan, kritik kuota perepuan, laporan acara, Kerjasama antar kelompok, lembar pernyataan ataupun permintaan, laman pendaftaran keaggotaan, Buletin majalah AFER serta berbagai hal lainnya berkenaan distribusi informasi isu (Federasi Nasional Parlemen Feminis – Situs Yang Mendukung Politik Feminis Dan Aktivitas Sipil., 2021). Pada politik informasi, AFER banyak membuka ruang diskusi secara langsung berupa kuliah umum, simposium, lokakarya, dan seminar yang dilakukan secara offline (sebelum pandemi) dan dilakukan secara online melalui platform Zoom meeting. Selain itu hasil dari rapat, simposium, seminar dan lainnya dapat diakses di website resmi AFER sebagai anggota. Pendistribusian informasi mengenai advokasi perempuan ini aktif AFER sebar di website resminya, tidak hanya laporan acara namun pendistribusian informasi acara yang akan datang juga dapat dilihat pada simposium internasional yang akan dilaksanakan pukul 13.00-15.00 pada minggu, 6 Februari 2022 mendatang (AFER, 2022).

Pada simposium tersebut akan membahas mengenai perbandingan jumlah anggota parlemen perempuan di Jepang dan Taiwan serta faktor yang membagi kesetaraan gender dalam bidang politik antara kedua negara, yang sama-sama memiliki sistem pemilihan pararl untuk perwakilan proposional di daerah pemilihan kecil (pemilihan nasional) dan sistem distrik (pemilihan lokal). Diketahui persentase anggota perempuan Jepang yakni 9,7% (2021) di Majelis Rendah (Shugi-in), 22,6% (2019) di dewan penasihat, dan 20,5% di kota-kota yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan di Taiwan telah lahir seorang presiden dan wakil presiden perempuan, dalam Diet jumlah anggota perempuan sebesar 41,6% (2020) yang merupakan persentase perempuan terbesar di Asia. Selain itu membahas mengenai upaya dalam meningkatkan

jumlah anggota perempuan dengan membandingkan sistem pemilihan, sistem kuota, serta lingkungan pencalonan bagi perempuan (AFER, 2022).

AFER bukan satu-satunya NGO yang menggunakan strategi politik informasi dalam mengadvokasikan kesetaraan gender, terdapat pula WINWIN yang turut menjadi salah satu pionir dalam mendelegasikan anggota parlemen perempuan. Hampir serupa dengan AFER, WINWIN menggunakan media facebook dan laman website resmi yang dapat diakses melalui <https://www.winwinjp.org>. Kedua media ini menjadi alat distribusi informasi yang dimaksimalkan oleh WINWIN, khususnya pada website WINWIN memberikan akses informasi berkenaan dengan kampanye peningkatan anggota perempuan di parlemen. Cukup berbeda dengan AFER, WINWIN mengarah pada kelompok kepentingan yang mempromosikan keterwakilan perempuan di politik. Pada laman website WINWIN, lebih mengarah pada visi, misi, ataupun tujuan dari WINWIN dalam memperkenalkan pentingnya kehadiran perempuan dalam Lembaga politik, selain itu menginformasikan terkait keberlangsungan pemilihan umum serta persentase perempuan di setiap tahunnya, dan membuka Akamatsu Seikei Juku yakni sekolah atau tempat belajar guna mengembangkan pemimpin perempuan di masa yang akan datang (WINWIN, 2021c).

### Gambar 3.1 Poster Simposium Internasional AFER “Hallo Demokrasi! Selamat Tinggal Prinsip utama Laki-laki” ke 2 guna Meningkatkan Anggota Parlemen Perempuan dari Perbandingan Jepang-Taiwan



Sumber : AFER, 2022

Melalui sekolah berbayar yang dibuka yakni Akamatsu Seikei Juku, WINWIN menyalurkan informasi berkenaan dengan kesetaraan gender dengan jauh lebih intensif, Akamatsu Seikei Juku dijadikan tempat untuk dapat bertukar informasi dan pembangunan jaringan antar industri yang berbeda melalui diskusi antar mahasiswa. Kuliah akan dilakukan sebulan sekali pukul 18.00 dengan durasi kuliah dua jam, dimana kuliah pertama akan langsung dibawakan oleh Ryoko Akamatsu. Akan ada 3 jenis kegiatan yakni kuliah 1 yang diisi oleh orang-orang yang terlibat dalam politik nasional dan lokal dengan pembahasan seputar alasan menjadi anggota diet, hasil dari keanggotaan diet, dan sebagainya. Kemudian terdapat kuliah 2 yang akan diisi oleh para pemimpin yang aktif diberbagai bidang, sehingga dapat mendistribusikan ilmu terkait kepemimpinan di berbagai bidang. Terakhir penjamuan setelah kuliah yakni jamuan makan malam serta tanya jawab ataupun diskusi dan membangun jaringan antar mahasiswa (WINWIN, 2021a).

**Gambar 3.2** Penutupan acara Akamatsu Seikei Juku, ke 5 Tahun 2019



Sumber : WINWIN, 2019

Selain dari Akamatsu Seikei Juku WINWIN juga selalu memberikan informasi pasca pemilu serta informasi lainnya berkenaan dengan representasi perempuan di politik melalui Newsletter. Misal pada Newsletter Jidai o Miru No 331 yang dikeluarkan pada 10 November 2021 yang menginformasikan pemilihan umum pada musim gugur, dimana WINWIN mengalami kesulitan, WINWIN yang telah menyiapkan kandidat dan meminta dukungan anggota, akan tetapi sebagian kecil dari mereka mengeluarkan hasil yang mengecewakan dan tidak semuanya terpilih. Dari hasil pemilu DPR 2021, terpilih 45 anggota perempuan jika dipersentasekan sebesar 9,7%, angka ini menurun dari 10,1% dari survei sebelumnya. Mengingat rendahnya proporsi parlemen menjadi faktor utama Jepang menjadi salah satu negara terendah dalam status perempuan. Pada tulisannya disebutkan bahwa alasan utama untuk ini yakni rasio anggota perempuan di partai LDP sebagai partai berkuasa hanya sebatas 7,7% kurang dari 10%, tidak heran mengapa persentase

perempuan menurun di tahun 2021 (WINWIN, 2021d). Baik AFER ataupun WINWIN memiliki strategi tersendiri dalam politik informasi guna mendistribusikan wawasan, ilmu, dan informasi sebagai upaya advokasi

## 2. *Symbolic Politic*

Strategi kedua yang digunakan dalam jaringan advokasi transnasional adalah symbolic politics atau politik simbolik. Strategi ini biasanya muncul ketika peristiwa-peristiwa penting terjadi dan dibingkai secara simbolik untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dan memperluas fondasi jaringan tersebut. (Sikkink K, 1999). Dalam arti lain, politik simbolik merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh suatu jaringan advokasi internasional dengan cara memberi simbol melalui aksi-aksi atau tindakan lainnya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Startegi simbol ini dilakukan oleh AFER dan WINWIN melalui kampanye pengangkatan isu kesetaraan gender sebagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni dibidang politik.

AFER dan WINWIN sebagai salah satu aktor yang vokal dalam mengkampanyekan representasi dan keamanan perempuan di parlemen, menggunakan simbol-simbol pendukung dalam mengadvokasikan isu. Misal pertama pada AFER, setiap tahunnya terlepas dari hari-hari peringatan kesetaraan perempuan, AFER selalu memberikan tanggapan, kritik, protes, serta promosi terhadap representasi perempuan. Politik simbol yang dapat terlihat pada peringatan Hari Perempuan internasional, AFER memperingati hari tersebut dengan menyelenggarakan kampanye dengan berbagai bentuk. Misal pada Minggu, 8 Maret 2015 lalu, bersamaan dengan Hari Perempuan internasional AFER melakukan Kampanye Perempuan dan Politik 2015 dengan mengajak dan mengumpulkan massa untuk melakukan aksi jalanan yakni di depan Stasiun Shibuya Jalan Hachiko. Aksi ini menuntut atas peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan serta kecaman atas kasus seksisme yang dialami oleh anggota parlemen perempuan. Presentase anggota parlemen perempuan di kotamadya Jepang hanya sebesar 11,6% itu berarti  $\frac{1}{4}$  dari semua kotamadya tidak memiliki anggota perempuan, mereka menyebut peristiwa ini dengan "Parlemen Nol Perempuan". Mereka yakin bahwa sedikitnya jumlah anggota perempuan di pemerintah juga berkontribusi terhadap sedikitnya jumlah perempuan dalam diet. Di lain sisi, Gerakan backlash yang mencegah promosi kesetaraan gender masih terus berlanjut oleh orang-orang yang berpegang teguh pada maskulinitas (AFER, 2015).



Berbeda dengan AFER, WINWIN tidak begitu menampakkan usaha politik simboliknya dalam mengadvokasikan keterwakilan perempuan di parlemen. WINWIN lebih menguatkan distribusi informasi melalui Akamatsu Seikei Juku guna mengedukasikan kesetaraan gender pada peserta. Pada website resminya lebih mendistribusi terkait keadaan parlemen, persentase kuota perempuan, serta pendaftaran dan keberlangsungan dari Akamatsu Seikei Juku.

### 3. Leverage Politic

Dua strategi atau taktik yang telah di sebutkan sebelumnya yakni strategi information politics dan symbolic politics, dalam upaya advokasi kesetaraan gender di parlemen dirasa kurang efektif untuk dapat mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya persentase perempuan di tahun 2021 lalu dimana hanya 9% saja yang berhasil menduduki parlemen. Oleh karena itu, demi memaksimalkan proses advokasi AFER dan WINWIN yang berada ditengah-tengah jejaring advokasi internasional, merasa perlu untuk menggunakan strategi ketiga yakni Leverage politics.

Leverage politics sendiri merupakan suatu cara atau strategi dengan mendorong, membujuk, bahkan menekan keterlibatan aktor-aktor kuat yang memiliki kuasa besar guna memengaruhi suatu kebijakan negara, demi menguatkan pergerakan jaringan advokasi transnasional tersebut. Dengan menggunakan pengaruh atas lembaga-lembaga yang lebih kuat, maka kelompok-kelompok yang lemah akan memperoleh pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk dapat mempengaruhi praktik-praktik negara secara langsung. (Keck & Sikkink, 1999). Menurut Robert C. Blitt, penggunaan leverage politics yang efektif bergantung pada kemampuan jaringan dalam menekan dan memersuasi aktor yang ditargetkan untuk dapat mengubah perilakunya. Leverage politics dalam mengidentifikasi titik pengaruh, terdapat dua jenis

pengaruh dalam strategi ini, yakni pengaruh material dan pengaruh moral. Pengaruh material dapat berupa keterlibatan uang, barang, atau berbagai macam keuntungan lainnya. Sedangkan, pengaruh moral merujuk pada ‘mobilization of shame,’ yang mana menempatkan perilaku atau rasa “malu” aktor yang menjadi target sebagai pusat perhatian internasional.

Gambar 3.3 Poster dan Foto Aksi Kampanye Perempuan dan Politik di Hari Perempuan Internasional



Sumber: AFER, Jousei to Seiji, 2015

AFER dalam leverage politics merangkul beberapa stakeholders terkait guna memperkuat posisinya, yakni Japan National Press Club (JNPC), National Woman Education Center (NVEC), dan beberapa anggota majelis pendukung. Berdasarkan dua pengaruh diatas yakni pengaruh material dan rasa malu, Bersama 3 stakeholdernya memudahkan AFER dalam berkampanye, memobilisasi, dan mengedukasi masyarakat. Misal pada tanggal 12 April 2021, AFER bekerjasama dengan JNPC menjadi ruang dalam sebuah sesi studi yang membahas tentang pelecehan di parlemen dan rendahnya jumlah anggota Wanita yang tidak kunjung bertambah. Acara ini juga ditampilkan dan didukung oleh Yoshiko Maeda (anggota Majelis Kota Hachioji), Kaoru Masuda (anggota Majelis Kota Matsudo) dan Masako Ito (anggota Majelis Kota Kawagoe) dari sekretariat, dalam hal ini AFER tidak hanya merangkul aktor dari eksternal pemerintahan saja, namun turut merangkul aktor internal pemerintahan (AFER, 2021b). Selain dari JNPC, Bersama dengan NVEC membuka pelatihan dalam promosi kesetaraan gender yang berjudul intimidasi dan pelecehan anggota

minoritas perempuan yang diselenggarakan pada 11 Desember 2021 (AFER, 2021a). NWEK sebagai pusat nasional untuk Pendidikan perempuan setara gender, memudahkan AFER dalam mendistribusikan informasi dengan fasilitas lengkap yang dimiliki oleh NWEK (NWEK, 2021).

Kemudian pada pengaruh kedua yakni pengaruh moral di mana menekankan pada 'mobilization of shame', strategi ini turut dilakukan oleh AFER. Misal mulanya kepekaan terhadap kesetaraan gender cenderung diabaikan oleh banyak orang bahkan entitas negara sekalipun, sehingga kuota perempuan di parlemen dan keamanan perempuan di parlemen mengkhawatirkan. Kemudian perlahan muncul organisasi yang memberikan suntikan moral terkait gender equality. Dengan meningkatnya norma ini menjadi norma universal, maka bagi negara ataupun pemerintah yang tidak turut mengikuti norma ini akan merasakan "malu" di mata dunia internasional, sehingga ini dapat menjadi tekanan bagi negara atau pemerintah tersebut, untuk dapat turut menjalankan prinsip norma kesetaraan gender oleh AFER dan WINWIN ini. Terlebih kesetaraan gender telah tertulis dalam konstitusi suatu negara atau bahkan konstitusi internasional, maka tekanan rasa malu akan semakin tinggi dengan adanya hal tersebut. Misal berupa SDG's poin 5 Achieve gender equality and empower all women and girls oleh UN dan lainnya.

#### **B. Pengawasan Kebijakan dan Hasil Advokasi AFER dan WINWIN dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen Jepang**

Accountability Politics atau politik akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari strategi TAN yang bertujuan agar isu kesetaraan gender yang sedang digandrungi oleh para aktor-aktor pelaksana program tersebut tetap dapat berpegang teguh dalam memegang prinsip yang sudah disepakati bersama. Melalui cara strategi ini AFER dan WINWIN dengan posisi yang dimilikinya memiliki peran untuk dapat mengamati dan mengontrol proses jenjang di antara kesepakatan dan praktiknya, terkhusus jika ketika aktor yang ditargetkan telah mengubah posisinya dalam suatu isu tertentu dan menyalahi prinsip-prinsip yang sudah dijalankan (Sikkink, 1999). Pada politik akuntabilitas baik AFER ataupun WINWIN vokal dalam memberikan kritik dan pengawasan kepada pemerintah agar pemerintah dapat tetap konsisten terhadap kebijakan dan prinsip yang telah dibuat sebelumnya.

AFER melalui website resminya selalu mengawasi pergerakan pemerintah, apabila pemerintah melakukan perbuatan diluar dari komitmen sebelumnya, AFER akan memperingatkan dengan surat terbuka berisi protes ataupun permintaan. Misal seperti yang terjadi pada kasus Yoshiro Mori di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo

berkenaan dengan ungkapan seksis yang dikeluarkannya, sehingga AFER sebagai salah satu NGO yang mendesak Yoshiro Mori untuk mengundurkan diri dari semua jabatan publik, termasuk Ketua sebab tidak memenuhi syarat untuk jabatan publik dari pandangannya terhadap gender. Contoh lain pada pernyataan mendesak pemerintah untuk: 1) Pemerintah harus secara proaktif bekerja mendukung pembentukan perjanjian internasional dengan efek yang kuat dari "melengkapi perjanjian yang mengikat dengan rekomendasi". 2) Pemerintah harus mempromosikan undang-undang untuk mengatur pelecehan seksual. 3) Meratifikasi perjanjian segera ketika memberlakukannya. Desakan tersebut diadopsi dari perjanjian mengikat dalam kerangka standar internasional ILO (AFER, 2018b). Selain dari AFER, WINWIN juga menyampaikan kekecewaan dan protesnya melalui Newsletter di website resminya. Misal pada pemilihan bulan oktober lalu, WINWIN mengungkapkan kekecewaannya atas rendahnya proposi perempuan di parlemen dimana hal ini bercermin pada partai LDP sebagai partai besar yang memiliki proporsi perempuan yang rendah. Selain itu juga WINWIN turut mengkritik posisi status perempuan di Jepang yang sudah lama tidak mampu menembus peringkat ke-100, dan WINWIN menaruh harapan tahun depan dengan harapan akan mencapai peringkat 90, hal ini seharusnya menjadi koreksi kepada pemerintah atas rendahnya proporsi yang terjadi (WINWIN, 2021d).

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah atas respon dari hadirnya sebuah rezim internasional yang mengangkat isu kesetaraan gender diberbagai bidang. Kebijakan tersebut meliputi EEOL, Child Care and Family Care Leave Law, The Basic Law (1999), Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims, The Act on Improvement etc. of Employment Management for Part-Time Workers, dan Abenomics. Kebijakan tersebut tidak terfokus pada keterwakilan perempuan di parlemen, dimana kebijakan tersebut mengarah pada perlindungan-perlindungan tertentu kepada wanita. Hingga saat ini Jepang masih memiliki persentase rendah pada keterwakilan perempuan, berikut grafik keterwakilan perempuan di parlemen nasional pada Grafik 3.1.

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa persentase keterwakilan perempuan di parlemen paling tinggi berada pada tahun 2009-2010 dimana mencapai 11,25%. Namun, jika ditinjau dari tahun 2017 hingga 2019 persentase konstan berada di 10,1% namun sayangnya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 9,89% (The World Bank, 2020). Seperti yang terlihat pada grafik bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah fluktuatif, apabila melihat dari buku karya Inoguchi Takahashi berjudul Japanese Foreign Policy Today, disebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 pilar pemerintahan Jepang yakni



birokrasi, Diet dan partai politik, Bisnis, dan Media (Inoguchi Takashi, 2000). Partai politik berkuasa yakni LDP sendiri pada pemilihan umum di Oktober musim gugur 2021 lalu hanya 7,7% perempuan saja yang ada didalamnya. Kepentingan dari 4 aktor tersebut belum ada yang benar-benar memposisikan diri untuk membuka kuota gender dengan lapang.

**Grafik 3.1 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di Parlemen Nasional dalam Persen (%)**



Sumber: The World Bank, 2020

Jika dilihat dari grafik diatas dimana pada 2020 perempuan di parlemen nasional hanya sebesar 9.89% saja, maka kesetaraan gender di Jepang memang masih belum terwujud sepenuhnya. Usaha advokasi yang dilakukan oleh NGO, kelompok kepentingan, ataupun beberapa tokoh majelis masih belum bisa meninggikan persentase kedudukan perempuan di politik. Akan tetapi terdapat beberapa upaya yang setidaknya dapat dilihat pada usaha dari AFER dan WINWIN. WINWIN memberi supporting pencalonan perempuan di parlemen dalam berbagai persiapannya, hal ini tentu membuahkan hasil, misal pada pemilihan anggota dewan Oktober 2017 lalu, mengirimkan sebanyak 23 orang rekomendasi dengan pemenang yang lolos sebanyak 13 orang (57%) dari partai Komeito, Nihon mirai no tou, dan didominasi oleh LDP. Proporsi perempuan memang masih sedikit, akan tetapi setidaknya terdapat 57% yang menjadi pemenang pada pemilu 2017 lalu (WINWIN, 2017).

Sebagai perincian jumlah perempuan yang disupport oleh WINWIN baik yang direkomendasikan dan yang menjadi pemenang pada pemilihan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berbeda halnya dengann WINWIN yang terjun langsung dalam merekomendasikan perempuan di

parlemen, AFER lebih mengarah pada simposium internasional serta survei menggunakan kuisioner terhadap pihak atau aktor terkait. AFER menjalin relasi dengan aktor advokasi lainnya guna membentuk jaringan dalam memobilisasi informasi dalam upaya empowering perempuan di berbagai bidang salah satunya pada politik. Sehingga AFER lebih mengarah pada pendistribusiann informasi dan pemberdayaan perempuan dalam kepekaan gender.

**Tabel 3.1 Jumlah Pemenang Perempuan dalam Pemilihan Dewan dari WINWIN**

Tahun	Persentase	Rekomendasi	Pemenang
017	7%	3 Orang	3 Orang
016	3%	5 Orang	1 Orang
014	4,7%	7 Orang	1 Orang
013	0,8%	3 Orang	1 Orang
012	6%	5 Orang	1 Orang
010	1,7%	2 Orang	1 Orang
009	1,5%	3 Orang	1 Orang
007	6,7%	2 Orang	1 Orang

Sumber: WINWIN, 2017

## CONCLUSION

Ajaran Confusianisme menjadi alasan kuat lahirnya patriarki di Jepang, sebab mereka sangat anti-feminin, dan memiliki keyakinan mendasar bahwa perempuan memiliki sifat jahat, dan perempuan seharusnya berkedudukan dibawah laki-laki, sehingga hal ini yang kemudian membawa peran perempuan semakin rendah. Hal ini diperparah dengan dimulainya zaman Edo dibawah pimpinan Shogun Tokugawa Ieyasu dimana sistem ke-shogunan mulai digunakan, militer dianggap sebagai kekuatan utama, sehingga perempuan yang memiliki kekuatan fisik jauh dibawah laki-laki harus tunduk dan menjalani takdir sesuai dengan apa yang diperintahkan laki-laki dan patriarki menjadi budaya yang melekat pada masyarakat Jepang kala itu.

Pendidikan Perempuan mengacu pada asas Ryousaikenbo yakni "Istri yang baik dan Ibu yang bijaksana". Asas Ryousaikenbo lahir dari perpaduan ajaran Confusius dan pemikiran barat. Sehingga hal ini lebih menjurus pada doktrin dibandingkan dengan Pendidikan seutuhnya. Pasca Perang Dunia Dua barulah perempuan mulai menduduki proporsi yang mulai sesuai sebagai mana seharusnya.

Distribusi informasi yang sangat mudah untuk didapat menjadikan lahirnya pergerakan-pergerakan perempuan yang memperjuangkan hak nya. Perempuan Jepang pertama kali mampu memberikan hak untuk memilih dalam pemilihan Majelis Rendah pada 10 April 1946, di bawah Pendudukan pimpinan AS, yang merupakan pemilihan umum pertama setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Terdapat dua organisasi perempuan yang memfokuskan visi dan misi mereka pada keamanan dan keterwakilan perempuan di parlemen dan politik, yakni Alliance of Feminist Representatives (AFER) dan Women in New World, International Network (WINWIN). Baik AFER ataupun WINWIN memiliki strategi tersendiri dalam mengadvokasikan isu mereka baik dari penyebaran informasi diberbagai media (information politic), melakukan kampanye sebagai simbolisasi advokasi (symbolic politic), merangkul organisasi-organisasi dengan nilai yang sama seperti Japan National Press Club (JNPC), National Woman Education Center (NVEC), dan beberapa anggota majelis yang mendukung kesetaraan gender (leverage politic). Serta mengawasi pemerintah untuk tetap berpegang teguh terhadap komitmennya (accountability politic). Berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi hasil yang didapat masih tidak begitu memuaskan, dimana keterwakilan perempuan hingga saat ini masih belum mencapai 30% sesuai dengan mimpi perwujudan dari pemerintah Jepang.

## REFERENCE

Afer. (2015). もっと女性議員を増やそう!  
Afer. (2018a). Federasi Nasional Feminis – Federasi Nasional Feminis. [https://Afer-Fem.Org/?Page\\_Id=50](https://Afer-Fem.Org/?Page_Id=50)  
Afer. (2018b). Mengeluarkan Pernyataan Mendesak – Federasi Nasional Feminis. <https://Afer-Fem.Org/?P=720#More-720>  
Afer. (2018c). Sambutan Perwakilan / Tujuan Kegiatan – Federasi Nasional Anggota Parlemen Feminis. [https://Afer-Fem.Org/?Page\\_Id=175](https://Afer-Fem.Org/?Page_Id=175)  
Afer. (2021a). Forum Nwec 2021 W20 2021 – Pusat Pendidikan Wanita Nasional. <https://Afer-Fem.Org/?P=1595#More-1595>  
Afer. (2021b). Menghadiri Kelompok Studi Klub Pers Nasional Jepang “Gender And Politics” – Federasi Nasional Feminis. <https://Afer-Fem.Org/?P=1391>  
Afer. (2022). 国際シンポジウム 全国フェミニスト議員連盟 「Hello! 民主主義 Goodbye! “男”主義」第2弾 ～日台比較から女性議員増をめざして～ – 全国フェミニスト議員連盟. <https://Afer-Fem.Org/?P=1636#More-1636>  
Afifah Sausan Mizhari, 14323051. (2018). Analisis Internalisasi Norma Kesetaraan Gender Periode

1990-2017 Di Jepang.  
<https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/11043>  
Azizah, N. (2014). Advokasi Kuota Perempuan Di Indonesia.  
Azizah, N. (2018). Women Under Representation : Comparative Analysis Between Japan And Indonesia.  
De, M., & Montebugnoli, F. (N.D.). Changing World And The Growing Importance Of The Transnational Advocacy Network On Global Governance.  
Eto, M. (2010). To Cite This Article: Mikiko Eto (2010) Women And Representation In Japan. International Feminist Journal Of Politics, 12(2), 177–201. <https://doi.org/10.1080/14616741003665227>  
Federasi Nasional Parlemen Feminis – Situs Yang Mendukung Politik Feminis Dan Aktivitas Sipil. (2021). Afer. <https://Afer-Fem.Org/>  
Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Organization At Fifty: Exploration And Contestation In The Study Of World Politics. In Source: International Organization (Vol. 52, Issue 4). Autumn.  
Gelb, J. (2003). Gender Policies In Japan And The United States : Comparing Women’s Movements, Rights, And Politics. 181.  
Gender Equality Bureau Cabinet Office. (2001). Act On The Prevention Of Spousal Violence And The Protection Of Victims. [https://www.gender.go.jp/policy/no\\_violence/e-vaw/law/pdf/sv.pdf](https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/sv.pdf)  
Hartono, O. M. (2007). Wanita Jepang Dalam Perspektif Historis.  
Ilo. (1999). Japan - Basic Law For A Gender Equal Society (Law No. 78 Of 1999). [http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_isn=54049](http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=54049)  
Indun, R. (2017). Eksploitasi Perempuan Jaman Meiji. <http://repository.unsada.ac.id/cgi/oai2>  
Inoguchi Takashi. (2000). Japanese Foreign Policy Today. Japan Gov. (2020). Abenomics | The Government Of Japan - Japangov -. <https://www.japan.go.jp/abenomics/index.html>  
Japan Report. (2004). State Of Women In Urban Local Government Japan. <https://web.archive.org/web/20040612095630/http://www.unescap.org/huset/women/reports/japan.pdf>  
Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists Beyond Borders : Advocacy Networks In International Politics. Cornell University Press.  
Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational Advocacy Networks In International And Regional Politics\*.

- Keck, M. E., & Sikkink, K. (2018). Transnational Advocacy Networks In International And Regional Politics †\*.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes And Regime Consequences: Regimes As Intervening Variables. *International Organization* Vol. 36, No. 2, *International Regimes* (Spring, 1982), 185–205.
- Kurihara, R. (1991). The Japanese Woman Suffrage Movement. *Feminist Issues*, 11(2), 81–100. <https://doi.org/10.1007/Bf02685617>
- Lowndes, V. (2020). How Are Political Institutions Gendered? *Political Studies*, 68(3), 543–564. <https://doi.org/10.1177/0032321719867667>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2009). The Logic Of Appropriateness. In *The Oxford Handbook Of Public Policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/Oxfordhb/9780199548453.003.0034>
- Maria Cristin Shara Simorangkir. (2017). Feminisme Pada Masa Meiji Di Jepang Nihon De Meiji Jidai No Joukenron.
- Mikiko Eto. (2005). Women’s Movements In Japan: The Intersection Between Everyday Life And Politics. 311–333. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.955.7840&rep=rep1&type=pdf>
- Ministry Of Health, L. And W. (2008). Introduction To The Revised Child Care And Family Care Leave Law. <https://www.mhlw.go.jp/english/policy/affairs/dl/05.pdf>
- Mizhari, A. S. (2018). Analisis Internalisasi Norma Kesetaraan Gender. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11043/05.%204%20bab%204.pdf?sequence=8&isallowed=Y>
- Mukhopadhyay, M. (2004). Mainstreaming Gender Or “Streaming” Gender Away: Feminists Marooned In The Development Business. *Ids Bulletin*, 35(4), 95–103. <https://doi.org/10.1111/J.1759-5436.2004.Tb00161.X>
- Murray, R. (2014). Quotas For Men: Reframing Gender Quotas As A Means Of Improving Representation For All. *American Political Science Review*, 108(3), 520–532. <https://doi.org/10.1017/S0003055414000239>
- Narayan, S. (2016). Women In Meiji Japan: Exploring The Underclass Of Japanese Industrialization. *Inquiries Journal*, 8(02). <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1369/women-in-meiji-japan-exploring-the-underclass-of-japanese-industrialization>
- Nina Alia Ariefa. (2020, July 21). Peran Perempuan Jepang Dalam Perspektif Gender. Universitas Al Azhar Indonesia. <https://eprints.uai.ac.id/1427/1/ILs0038-20.Pdf>
- Norris Pippa. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules And Political Behavior*. Cambridge University Press.
- Nwec. (2021). Reiwa Tahun Ke-3 “Forum Promosi Kesetaraan Gender” | Pusat Pendidikan Wanita Nasional. [https://www.nwec.jp/event/training/g\\_forum2021.html](https://www.nwec.jp/event/training/g_forum2021.html)
- Ohchr. (1996). Ohchr | Optional Protocol Cedaw. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opcedaw.aspx>
- Shepherd, L. J. (2014). Sex Or Gender? Bodies In Global Politics And Why Gender Matters. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/uql/detail.action?docid=1744166>.
- Silva, M. A. (2010). Women In Ancient Japan: From Matriarchal Antiquity To Acquiescent Confinement. *Inquiries Journal*, 2(09). <http://www.inquiriesjournal.com/articles/286/women-in-ancient-japan-from-matriarchal-antiquity-to-acquiescent-confinement>
- The Japan Times. (2020, March 6). Women In Japanese Politics: Why So Few After So Very Long? | The Japan Times. <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/06/reference/women-in-japanese-politics/>
- The World Bank. (2020). Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Nasional (%) - Jepang | Data. <https://data.worldbank.org/indicator/Sg.Gen.Parl.Zs?locations=Jp>
- Vera Mackie. (2003). *The Japanese Woman Suffrage Movement*. Cambridge University Press.
- Winwin. (2017). <Situasi Pemenang Yang Direkomendasikan> Mendukung Politisi Perempuan Dan Kandidat Perempuan-Menang Menang Menang. [https://www.winwinjp.org/translate/goog/winwin\\_election/?\\_X\\_Tr\\_Sl=Ja&\\_X\\_Tr\\_Tl=Id&\\_X\\_Tr\\_Hl=Id&\\_X\\_Tr\\_Pto=Sc&\\_X\\_Tr\\_Sch=Http](https://www.winwinjp.org/translate/goog/winwin_election/?_X_Tr_Sl=Ja&_X_Tr_Tl=Id&_X_Tr_Hl=Id&_X_Tr_Pto=Sc&_X_Tr_Sch=Http)
- Winwin. (2021a). <Perekrutan Akamatsu Seikei Juku> Mendukung Politisi Dan Kandidat Wanita-Menang Menang Menang-Menang. [https://www.winwinjp.org/translate/goog/invitation/?\\_X\\_Tr\\_Sl=Ja&\\_X\\_Tr\\_Tl=Id&\\_X\\_Tr\\_Hl=Id&\\_X\\_Tr\\_Pto=Sc&\\_X\\_Tr\\_Sch=Http](https://www.winwinjp.org/translate/goog/invitation/?_X_Tr_Sl=Ja&_X_Tr_Tl=Id&_X_Tr_Hl=Id&_X_Tr_Pto=Sc&_X_Tr_Sch=Http)
- Winwin. (2021b). Mendukung Politisi Perempuan Dan Kandidat Perempuan-Menang Menang Menang-Menang | Hanya Situs Wordpress Lainnya. [https://www.winwinjp.org/translate/goog/?\\_X\\_Tr\\_Sch=Http&\\_X\\_Tr\\_Sl=Ja&\\_X\\_Tr\\_Tl=Id&\\_X\\_Tr\\_Hl=Id&\\_X\\_Tr\\_Pto=Sc](https://www.winwinjp.org/translate/goog/?_X_Tr_Sch=Http&_X_Tr_Sl=Ja&_X_Tr_Tl=Id&_X_Tr_Hl=Id&_X_Tr_Pto=Sc)
- Winwin. (2021c). Mendukung Politisi Perempuan Dan Kandidat Perempuan-Menang Menang Menang-

Menang | Hanya Situs Wordpress Lainnya.  
[https://www.winwinjp-  
Org.Translate.Goog/?\\_X\\_Tr\\_Sl=Ja&\\_X\\_Tr\\_Tl=Id&  
\\_X\\_Tr\\_Hl=Id&\\_X\\_Tr\\_Pto=Sc&\\_X\\_Tr\\_Sch=Http](https://www.winwinjp-org.translate.goog/?_X_Tr_Sl=Ja&_X_Tr_Tl=Id&_X_Tr_Hl=Id&_X_Tr_Pto=Sc&_X_Tr_Sch=Http)  
Winwin. (2021d). November 2021 Newsletter Melihat  
Waktu No331 Mendukung Politik Dan Caleg  
Perempuan-Menang Menang Menang-Menang.  
[https://www.winwinjp-  
Org.Translate.Goog/Column/2021%E5%B9%B411  
%E6%9c%88%E3%83%8b%E3%83%A5%E3%83  
%Bc%E3%82%B9%E3%83%Ac%E3%82%Bf%E3  
%83%Bc%E3%80%80%E6%99%82%E4%Bb%A3  
%E3%82%92%E8%A6%96%E3%82%8b%E3%80  
%80no331/?\\_X\\_Tr\\_Sch=Http&\\_X\\_Tr\\_Sl=Ja&\\_X\\_  
Tr\\_Tl=Id&\\_X\\_Tr\\_Hl=Id&\\_X\\_Tr\\_Pto=Sc](https://www.winwinjp-org.translate.goog/Column/2021%E5%B9%B411%E6%9c%88%E3%83%8b%E3%83%A5%E3%83%Bc%E3%82%B9%E3%83%Ac%E3%82%Bf%E3%83%Bc%E3%80%80%E6%99%82%E4%Bb%A3%E3%82%92%E8%A6%96%E3%82%8b%E3%80no331/?_X_Tr_Sch=Http&_X_Tr_Sl=Ja&_X_Tr_Tl=Id&_X_Tr_Hl=Id&_X_Tr_Pto=Sc)